

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa *meaningful participation* dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara belum terwujud secara substantif. Meskipun secara formal pembentuk undang-undang telah menyediakan ruang partisipasi melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan konsultasi dengan akademisi maupun pakar, kualitas pelibatan tersebut masih bersifat terbatas dan elitis. Akses informasi yang tidak setara, khususnya tidak tersedianya draf RUU kepada peserta RDPU, serta tidak adanya kejelasan mengenai sejauh mana aspirasi publik dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, menunjukkan bahwa partisipasi publik lebih berfungsi sebagai pemenuhan prosedur formal daripada sebagai sarana deliberatif yang berpengaruh. Dengan demikian, partisipasi yang terjadi belum memenuhi indikator *meaningful participation* sebagaimana dipahami dalam negara hukum modern, yakni partisipasi yang inklusif, informatif, dan memiliki dampak nyata terhadap substansi kebijakan.
2. Berdasarkan temuan dan analisis pada Bab IV, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *meaningful participation* dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya memenuhi standar ideal partisipasi bermakna dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. Dari sisi prinsip *syūrā'*, proses legislasi menunjukkan adanya upaya musyawarah substantif melalui pelibatan pakar, akademisi, dan

lembaga terdampak dalam berbagai forum resmi, yang menandakan terbukanya ruang dialog antara pembentuk undang-undang dan pemangku kepentingan. Namun, pelaksanaan partisipasi tersebut masih menghadapi keterbatasan pada aspek keadilan prosedural dan pemerataan akses, sehingga partisipasi publik belum berlangsung secara inklusif dan setara. Selanjutnya, ditinjau dari prinsip *al-'adālah* dan *maṣlahah*, pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah menghasilkan manfaat tertentu bagi penguatan tata kelola BUMN, tetapi belum sepenuhnya menjamin terwujudnya kemaslahatan umum yang luas dan berkelanjutan. Ketimpangan dalam akses informasi serta terbatasnya keterlibatan masyarakat secara langsung menunjukkan bahwa proses partisipasi masih cenderung elitis dan belum optimal dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan publik.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pemaparan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis ingin memberikan saran kepada Pembentuk undang-undang untuk memperkuat kualitas partisipasi publik dalam proses legislasi dengan memastikan keterbukaan akses terhadap draf rancangan undang-undang serta memberikan ruang yang memadai bagi penyampaian dan pertimbangan aspirasi masyarakat secara substantif, tidak semata-mata prosedural.

Selain itu, diperlukan penguatan peran akademisi dan masyarakat sipil dalam mengawal proses pembentukan undang-undang melalui partisipasi yang berbasis kajian dan data, sehingga partisipasi publik berfungsi sebagai instrumen kontrol yang konstruktif dalam mewujudkan legislasi yang adil, berorientasi pada kepentingan umum, dan selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlan, F. (n.d.). *Arti Meaningful Participation dalam Penyusunan Peraturan. Hukum Online.Com.* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-meaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0/>
- Al-Mawardi, I. (2016). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press.
- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-muwafaqat fi usul al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Tawfikia.
- Andi Muh. Arif. (2022). *ANALISIS YURIDIS PARTISIPASI PUBLIK BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG- MAHKAMAH KONSTITUSI No . 91 / PUU-. 91*.
- Andriani, H. (2023). Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 306. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>
- Aprilya, P. K., & Tohawi, A. (2024). Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 1–15.
- Artioko, F. R. (2022). Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Al-Qisth Law Review*, 6(1), 52. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>
- Ashidiq, R., & Rohmah, S. N. (2023). Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(2), 457–470.
- Asnawi, M. I. (2016). Implikasi Pengelolaan BUMN Persero dalam Kerangka Welfare State berdasarkan Mekanisme Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 126–144.
- Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi. *(No Title)*.

- Astriani, A., Shafar, A. G., & Kurniati, K. (2024). Sejarah Etika Politik dan Hubungannya Dengan Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 182–192.
- Asy-Syawi, T. M. (1997). *Syura bukan demokrasi*. Gema Insani.
- Ayu Azkiah. (2021). Partisipasi Publik dalam Legislasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif Hukum Islam. In *Tesis*.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Terjemah Tafsir Al-Munir*. Gema Insani.
- Bahari, S., Sinaga, M. P. P. M., & Putri, Z. M. (2025). REKONSTRUKSI PEMAKNAAN HAK MENGUASAI NEGARA MENURUT PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945. *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, 2(01), 46–55.
- Cappelletti, M. (1971). Judicial review in the contemporary world. (*No Title*).
- Djazuli, A. (2003). Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah. (*No Title*).
- Djuniarsono, R., Roestamy, M., & Suhartini, E. (2023). Privatisasi BUMN Sebagai Pilar Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(1), 1–15.
- Efendi, S. (2024). *Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam*. 3(1), 69–78.
- Elviandri, E., Dimyati, K., & Absori, A. (2019). *Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia*.
- Firdaus, F. R., Chandra, R. L., & Sagala, C. S. T. (2024). *Meaningful Participation as People ' s Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State Fahmi Ramadhan Firdaus * Department of Constitutional Law , Faculty of Law University of Jember , Jawa Timur , Indonesia , fahmirf@unej.ac.id , ORCID ID 0000-0003-4580.31, 337–357*.
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>
- FITRA. (n.d.). *Catatan Kritis Ruang Gelap Pembahasan RUU BUMN Yang*

- Mengabaikan Prosedur Formil dan Materil Legislasi*. SEKNAS FITRA.
<https://seknasfitra.org/catatan-kritis-ruang-gelap-pembahasan-ruu-bumn-yang-mengabaikan-prosedur-formil-dan-materil-legislasi/>
- Handoyo, B. H. C., & SH, M. (2021). *Prinsip-prinsip legislatif dan akademik drafting: pedoman bagi perancangan peraturan perundang-undangan*. PT Kanisius.
- Hasymy, A. (1970). *Dimana letaknya negara Islam! (No Title)*.
- IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 64/PUU- XXIII/2025.
[https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4604_2717_ikhtisar_64_PUU_2025_Formil_BUMN_\(ACC_PM_III\).pdf](https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4604_2717_ikhtisar_64_PUU_2025_Formil_BUMN_(ACC_PM_III).pdf)
- Indonesia, (Undang-Undang Republik. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. *Negara Republik Indonesia*, 144881, 1–63.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Iqbal, M., & Madjid, N. (2001). *Fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Gaya Media Pratama.
<https://books.google.co.id/books?id=cYclAEACAAJ>
- Ishaq. (2014). *Metode Penelitian Hukum Progresif*. In *Metode Penelitian Hukum* (Issue March 2018).
http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode_Penelitian_Hukum.pdf
- Ismail, H. F. (2019). *Islam, Konstitusionalisme dan Pluralisme*. IRCiSoD.
- Ismail, S. (1982). *Mencari Keadilan*. Jakarta, PT. Ghalia Indonesia.
- Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Januarti, V., Edyar, B., & Wihidayati, S. (2025). *Politik Hukum terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah*. INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.
- Kesuma, A. S. (2013). *Islam Dan Politik Pemerintahan (Pemikiran Politik*

- Muhammad Husein Haikal). *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 13(2), 457–480.
- Keterangan DPR dan Presiden PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025. (2025). [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/12791_Risalah-pdf_PERKARA NOMOR 52.64.PUU-XXIII.2025 tgl. 24 Juni 2025.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/12791_Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%2052.64.PUU-XXIII.2025%20tgl.%2024%20Juni%202025.pdf)
- Kompas, T. (n.d.). *Mengapa Sejumlah Kalangan Ramai-ramai Mengajukan Uji Formil dan Materiil UU BUMN ke MK?* Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-sejumlah-kalangan-ramai-ramai-mengajukan-uji-formil-dan-materiil-uu-bumn-ke-mk>
- Kusnardi, M. (1983). Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. *Pusat Studi Hukum Tata Negara Indonesia*.
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Mahfud, M. (1999). *Pergulatan politik dan hukum di Indonesia*. Gama Media.
- Manan, B. (1996). Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian. *Fakultas Hukum UNILA, Lampung*, 16.
- Mandak, A. (2024). Penerapan Partisipasi Masyarakat Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 13(01).
- Marilang, M. (2012). Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 259–286.
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71–84. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Maulan, A., Chairunnisa, N., Khubaibah, S., & Slam, Z. (2025). PANCASILA SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL NEGARA INDONESIA. *Jurnal Manajemen Dan Inovasi*, 6(4).
- Miftakhul, A. (2025). *Implementasi prinsip Syura dan Good Governance dalam*

penetapan daftar pemilih tetap berdasarkan PKPU nomor 7 Tahun 2024: Studi di KPU Kota Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

MKRI, H. (2025a). *Kurang Partisipasi Publik, Mahasiswa UI Uji Formil UU BUMN.* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/berita/kurang-partisipasi-publik,-mahasiswa-ui-uji-formil-uu-bumn-23186>

MKRI, H. (2025b). *Pemohon Menyoal Ketiadaan Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU BUMN Bertambah.* Mahkamah Konstitusi RI. <https://www.mkri.id/berita/pemohon-menyoal-ketiadaan-partisipasi-publik-dalam-pembentukan-uu-bumn-bertambah-23327>

Mohar, S. (2025). *MK Nyatakan Pembentukan UU BUMN Konstitusional.* NERACA. https://www.neraca.co.id/article/225318/mk-nyatakan-pembentukan-uu-bumn-konstitusional?utm_source=chatgpt.com

Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram.*

Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452–468.

Muttaqin, E. Z., & Hikam, S. (2024). Konsep Meaningful Participation dalam Proses Legislasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1), 62–80. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4091>

Nursetiawan, E., & Ardhanariswari, R. (2022). Meaningful Participation in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law. *Jambe Law Journal*, 5(2), 251–270. <https://doi.org/10.22437/jlj.5.2.251-270>

Pakpahan, C. G., Farabi, M. F. F., & Rachmania, R. R. (2023). Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/202 dalam Menunjang Hak Konstitusional. *SALAM: Jurnal Sosial*

- Dan Budaya Syar-I*, 10(4), 1285–1308.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32560>
- Parlemen, T. (2022). *TVR 120 - REVISI UU BUMN DIANGGAP PERLU*. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=SOpG10AWlhg>
- Parlemen, T. (2025). *DPR RI : Paripurna DPR RI Sahkan RUU BUMN Jadi Undang-Undang*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=9lwyummDrCo>
- PERKARA NOMOR 64/PUU- XXIII/2025, Pub. L. No. 64 (2025).
[https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4604_2717_ikhtisar_64_PUU_2025_Formil BUMN \(ACC PM III\).pdf](https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4604_2717_ikhtisar_64_PUU_2025_Formil BUMN (ACC PM III).pdf)
- Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2025 (2025).
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf
- Prastyo, A. (2022). “Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(3), 405–436.
- Pratama, N. A. (2022). Meaningful Participation sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk No. 91/PUU-XVIII/2020. *Credito*, 4(2), 137–147.
- Prianto, W., Hukum, F., Ulama, N., Tenggara, S., Mayor, J., Katamso, J., Baruga, K., & Kendari, K. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 8–19.
<https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik>
- Pulungan, J. S. (1996). *Prinsip-prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pulungan, J. S. (2016). *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*.
- PUTUSAN Nomor 64/PUU-XXIII/2025, Pub. L. No. 64 (2025).
https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13173_1758097076.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pub. L. No. 91 (2020).

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (2020).
file:///C:/Users/salma/Downloads/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf

Rachman, A., Yochanan, E., Samanlangi, A., & Purnomo, H. (2024). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*.

Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*.

Riyani, W., Putri, N. L., & Info, A. (2023). *PRINSIP SYURA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA*. 03(1), 37–50.
<https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>

Rohmah, S. N., & Rahim, A. (2024). *Implementasi Pancasila Sila Ke 5 di Ma' had Al -Zaytun Berdasarkan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Siyasah Dusturiyah*. 7, 11610–11622.

Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). *Siyasah Dusturiyah. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.

Santoso, L. (n.d.). *EKSISTENSI PRINSIP SYURA DALAM*. 3(I), 113–134.

Sarah Malena Andrea Dondokambey. (2023). Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Lex Privatum, Volume XI(2)*, 5.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/46626>

Selfianus Laritmas, S. H., & Ahmad Rosidi, S. H. (2024). *Teori-teori Negara Hukum*. Prenada Media.

Sholahuddin, A.-A. (2025). *Terungkap! Ini Alasan Mahasiswa UI Gugat UU BUMN versi Terbaru*. Bisnis.Com.
<https://www.bisnis.com/read/20250508/638/1875437/terungkap-ini-alasan-mahasiswa-ui-gugat-uu-bumn-versi-terbaru>

Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122–128.

- Siddiqy, F. A. A., Saebani, B. A., & Sutiana, Y. (2025). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5), 3190–3202.
- Sukardja, A. (2012). *Hukum tata negara & hukum administrasi negara: dalam perspektif fikih siyasah*. Sinar Grafika.
- Sumartini, S., & Kholik, S. (n.d.). *Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern*. 224–242.
- Sunaryati, H. (1976). Apakah The Rule of Law. *Alumni, Bandung*.
- Syahrur, M. (2004). Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. *Sahiron Syamsuddin Yogyakarta: ELSAQ*.
- Syakir, S. A. (2012). *Tafsir Ibnu Katsir*. Dar al Sunnah Press.
- Topo, S. (n.d.). *TUJUAN PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR DANANTARA TIDAK JELAS ?!* https://www.youtube.com/watch?v=kF7qgxC5u_o&t=2468s
- Ulya, F. I., Yofita, E., Wulandari, F., & Desmawati, Y. (2020). Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perizinan Lingkungan Melalui Konsep Citizen Power. *Padjadjaran Law Review*, 8(1), 84–98.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1945). [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pub. L. No. 12 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pub. L. No. 13 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>
- Wilmar, P., & Toloh, Y. (2024). *dalam Pembentukan Peraturan Daerah sebagai Penguatan Demokrasi Lokal*.
- Yamin, M. (1951). proklamasi dan konstitusi Republik Indonesia. (No Title).
- Yosafat, D. (2026). *Rekor! UU TNI dan Polri Paling Banyak Diuji di MK pada 2025*. IDN TIMES. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rekor-uu-tni-dan-polri-paling-banyak-diuji-di-mk-pada-2025-00-jkxzp->

47yl1c?utm_source=chatgpt.com

Yunus, N. R. (2016). Menciptakan good and clean government berbasis Syariah Islamiyah dalam tatakelola pemerintahan Republik Indonesia. *Nur El-Islam*, 3(1), 143–175.

